



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

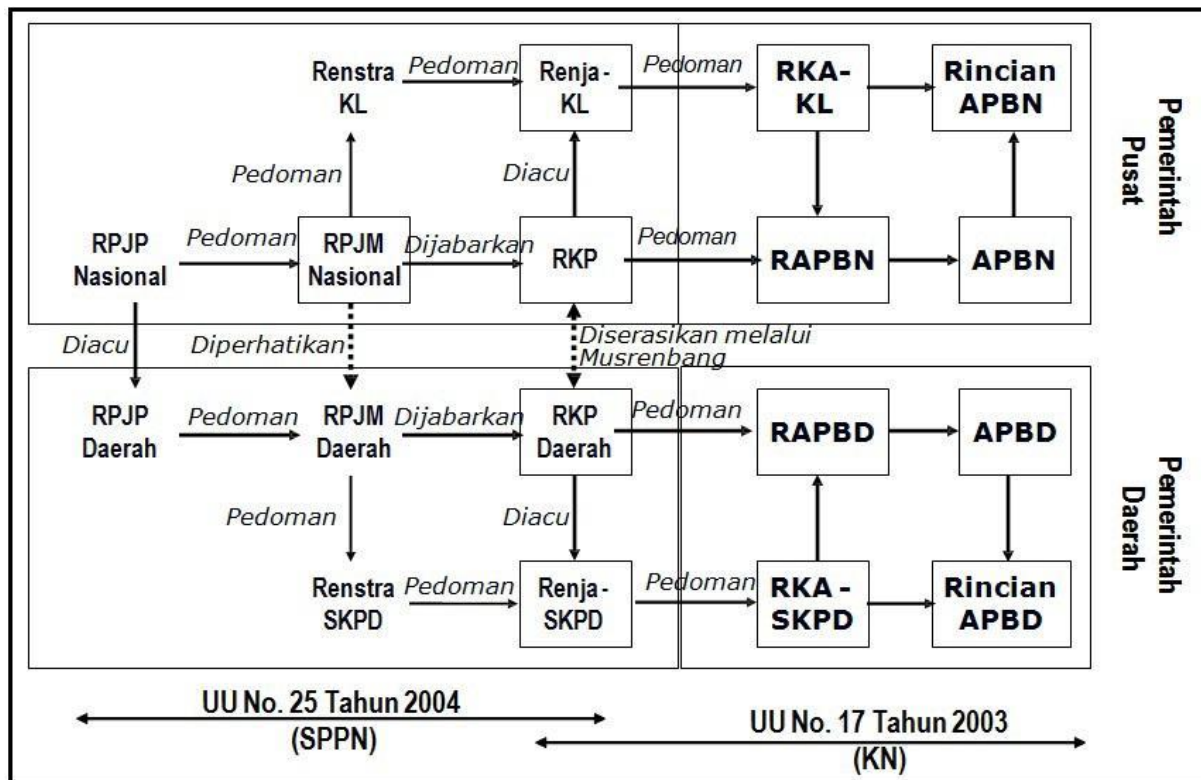
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Piyungan. Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan

Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024,
2. Evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan

Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	0	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	0	1 event					1 event	100
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	0	1 event	1 event	1 event	100 %	1 event	3 event	100
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 persen	100 %
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
	Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	kegiatan keistimewaan								
4.01.0 4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<i>Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>					<i>1 Dokumen</i>	<i>100</i>
		<i>Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat kapanewon</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>					<i>3 Dokumen</i>	<i>100</i>
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	4 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	100%
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2026	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	82.13 Angka	83 Angka	82.23 Angka	99.07%	85 Angka	85 Angka	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
7.01.0 1.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	28 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	21 Dokumen	100%
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Dokumen Hasil Evaluasi</i>	<i>42 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>					<i>4 Dokumen</i>	<i>100</i>
		<i>Dokumen Keuangan</i>	<i>37 Dokumen</i>	<i>37 Dokumen</i>					<i>37 Dokumen</i>	<i>100</i>
7.1.1.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	25 Laporan	5 laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	30 Laporan	100%
7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100
7.01.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan</i>	<i>26 Dokumen</i>	<i>26 Dokumen</i>					<i>26 Dokumen</i>	<i>100</i>
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 orang	35 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	35 orang	100
7.01.0 1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian</i>	<i>108 Orang/Bulan</i>	<i>108 Orang/Bulan</i>					<i>108 Orang/Bulan</i>	<i>100</i>
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
		Pelaksanaan Tugas ASN								
'7.1.1.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	88 Laporan	110 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%	22 Laporan	154 Laporan	100%
7.1.1.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100
'7.1.1.2 .05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokume n	7 Dokumen	100%
7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100
7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	<i>Komponen Instalasi Listrik</i>	<i>13 Jenis</i>	<i>13 Jenis</i>					<i>13 Jenis</i>	<i>100</i>
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16 Paket	20 Paket	4 Paket	4 paket	100 %	4 Paket	28 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>31 Jenis</i>	<i>31 Jenis</i>					<i>31 Jenis</i>	<i>100</i>
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Paket	20 Paket	4 Paket	4 paket	100 %	4 Paket	28 Paket	100%
7.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Bahan dan Peralatan kebersihan</i>	<i>16 Jenis</i>	<i>16 Jenis</i>					<i>16 Jenis</i>	<i>100</i>
		Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	16 Paket	20 Paket	4 Paket	4 paket	100 %	4 Paket	28 Paket	100
7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Barang Cetakan</i>	<i>3 Buah</i>	<i>3 Buah</i>					<i>3 Buah</i>	<i>100</i>
		<i>Penggandaan</i>	<i>50.388 Lembar</i>	<i>50.388 Lembar</i>					<i>50.388 Lembar</i>	<i>100</i>
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 Paket	20 Paket	4 Paket	4 paket	100 %	4 Paket	28 Paket	100%
7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>2 Jenis</i>					<i>2 Jenis</i>	<i>100</i>
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang undangan yng disediakan	4 Paket	5 Paket	1 Paket	1 paket	100 %	1 Paket	7 Paket	150
7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Laporan hasil rapat</i>	<i>46 Dokumen</i>	<i>46 Dokumen</i>					<i>46 Dokumen</i>	<i>100</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
		Perjalanan dinas dalam daerah	294 Orang/ Perjalan nan	294 Orang/ Perjala nan					294 Orang/ Perjalan an	100
		Perjalanan dinas luar daerah	2 Orang/ Perjala nan	2 Orang/ Perjala nan					2 Orang/ Perjalan an	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan	1.173 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	100 %	250 Laporan	1.468 Laporan	100%
7.01.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	100
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokume n	7 DOkumen	100%
7.01.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokume n	7 DOkumen	100%
7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	3 Jenis					3 Jenis	100
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	33 Unit	59 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	64 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Pembayaran Rekening Listrik</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>					<i>12 Bulan</i>	<i>100</i>
		<i>Pembayaran Rekening Air</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>					<i>12 Bulan</i>	<i>100</i>
		<i>Pembayaran Rekening Telephone</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>					<i>12 Bulan</i>	<i>100</i>
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	84 Laporan	100%
7.01.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>2 Jenis</i>					<i>2 Jenis</i>	<i>100</i>
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	28 Laporan	100%
7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>					<i>1 Dokumen</i>	<i>100</i>
		<i>Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>					<i>1 Dokumen</i>	<i>100</i>
		<i>Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>					<i>2 Dokumen</i>	<i>100</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	16 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	28 Laporan	100%
7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.1.1.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	<i>Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2</i>	<i>6 Unit</i>	<i>6 Unit</i>					<i>6 Unit</i>	<i>100</i>
		<i>Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>					<i>1 Unit</i>	<i>100</i>
		Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 Unit	36 Unit	8 Unit	8 Unit	100 %	8 Unit	52 Unit	100%
7.01.0 1.2.09. 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas</i>	<i>2 Unit</i>	<i>2 Unit</i>					<i>2 Unit</i>	<i>100</i>
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	10 Unit	12 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	16 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
		dipelihara/direhabilitasi								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompinkap	4 Dokumen	4 Dokumen					4 Dokumen	100
		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	28 Laporan	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 Dokumen	4 Dokumen					4 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17 Dokumen	21 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	29 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	100
		Masyarakat yang dilayani	7.200 orang	7.200 orang					7.200 orang	100
		Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	8 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	14 Laporan	100%
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan	40 Lembaga	50 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	70 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
		pembangunan di desa								
7.01.0 3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	4 Laporan	4 Laporan					4 Laporan	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	28 Laporan	150
7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen					4 Dokumen	100
		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi	8 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	13 Laporan	100%
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
7.01.0 4.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	11 kali	11 kali					11 kali	100
		Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	25 Laporan	4 Laporan	4 laporan	100%	5 Laporan	34 Laporan	100%
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	100

[illegible]

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Nihil	Nihil

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Perencanaan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu
	Gelar Budaya Jogja	Koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat, pelaku seni, kelompok UKM lokal Kap. Piyungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan kegiatan keistimewaan secara tepat waktu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya regulasi yang dapat diacu dalam penyusunan dokumen perencanaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja disusun secara rutin sesuai pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan kesesuaian antara target dan realisasi waktu dan kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadministrasian penyediaan gaji dan tunjangan tepat waktu
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan kinerja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan Pelaporan lancar
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan pengelolaan pegawai secara lebih tepat
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tertib administrasi kepegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Optimalisasi pelaksanaan PPID Kapanewon Piyungan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai target
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai target

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja telah sesuai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika dan Kalurahan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika dan Kalurahan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kab. Bantul
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM yang memadai
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari Dinas/Instansi, Kalurahan dan Lembaga masyarakat dalam sinkronisasi usulan program pembangunan masyarakat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TSKS dan Institusi lainnya
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, Lembaga masyarakat serta pelaku ekonomi lokal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama dan dukungan Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Lembaga Kamasyarakatan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama dan dukungan Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Lembaga Kamasyarakatan
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemberdayaan Ormas dan organisasi keagamaan serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi serta ber inovasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.

3. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
4. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Piyungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	95.11	95.28	95.37	95.53	-
2	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	3,70	3,80
3	Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	95,40	95,52

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Piyungan Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kapanewon Piyungan yang tidak memenuhi target/semua memenuhi target.
2. IKU Kapanewon Piyungan yang dapat memenuhi target adalah IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN Kapanewon Piyungan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan di Kapanewon Piyungan.

Inovasi tersebut antara lain dengan menambah fasilitas dan sarana prasarana di ruang pelayanan umum, diantaranya adalah pojok baca, *indoor playground* untuk anak-anak serta ruang laktasi.

- b. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal, Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Piyungan Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM yang kompeten serta sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan Kapanewon
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi dalam rangka penyampaian aduan Masyarakat terkait pelayanan
3. Tersedianya SOP terkait pelayanan Masyarakat didukung dengan adanya Pelayanan satu pintu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Kapanewon Piyungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen bersama personil Kapanewon Piyungan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah personil kapanewon yang terbatas
Sarana prasarana pendukung pelayanan prima dengan perangkat teknologi telah memadai	Belum optimalnya kemampuan SDM dalam mengikuti perkembangan teknologi informatika dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai harapan masyarakat

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Adanya anggaran DAIS untuk kalurahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desa mandiri budaya	Masyarakat belum memahami konsep DAIS sehingga akses untuk meraihnya belum maksimal
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Belum optimalnya kemampuan SDM pamong kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak	- Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi - Kurangnya pemahaman bumil terkait resiko dan bahaya kurangnya asupan gizi selama proses kehamilan

Peluang	Tantangan
	merupakan salah satu sebab kondisi stunting pada anak. - Kabupaten Layak Anak belum menjadi program prioritas di Kapanewon dan Kalurahan sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut masih kurang

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Binwas kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan DAIS
5. Pendampingan kepada kalurahan terkait penyesuaian anggaran untuk penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting serta kalurahan layak anak dalam RKP 2026
6. Mendukung kebijakan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Layak Anak dengan mewujudkan Kapanewon Layak Anak

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Piyungan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kapanewon Piyungan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 Persen	100.000.000	
						Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian Pelaksanaan Kegiatan adat dan tradisi di Kapanewon			
						Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66.040.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	35.996.000	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	0 Persen	50.000.000						
1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	66.040.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kapanewon Piyungan	Capaian Pelaksanaan Urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	100 Persen	35.996.000	
1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewo n Piyungan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dok	66.040.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dok	35.996.000	
2	Peningkatan budaya pemerintahan	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	50.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dok	50.000.000						
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Piyungan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3.842.479.175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Piyungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.70 Angka	3.484.740.217	
								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95.91 Indeks		
3	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan	100 Persen	30.000.000	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	5.100.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	2.550.000	
3.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Lporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Lporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.550.000	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.546.088.175	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.924.009.433	
4.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Ob	2.478.088.175	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Ob	2.874.749.433	
4.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dok	65.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	44.160.000	
4.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	5.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah	100 Persen	3.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah	100 Persen	2.550.000	
5.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	3.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	2.550.000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 Persen	469.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 Persen	151.777.400	
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.081.430	
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.883.210	
6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	43.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.603.700	
6.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.938.100	
6.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 DOK	6.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	2.400.000	
6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 Dok	249.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	82.168.000	
6.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	30.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	2.153.000	
6.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	2.550.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah	100 Persen	200.000.000						
7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14 Unit	200.000.000						
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	305.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	192.784.744	
8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.590.000	
8.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11.745.000	
8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lapran	175.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Lapran	118.449.744	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian kinerja pemeliharaan milik daerah	100 Persen	278.591.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	208.518.600	
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	7 Unit	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	9 Unit	167.761.650	
9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	108.591.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.756.950	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Piyungan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	96 Persen	165.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	100 Persen	35.050.000	
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Persen	115.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Persen	24.800.000	
10.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	14.175.000	
10.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dok	65.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dok	10.625.000	
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	95 Angka	50.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Piyungan	Cakupan Koordinasi Pelayanan Kapanewon	100 Persen	10.250.000	
11.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	10.250.000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapanewon Piyungan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	235.750.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	178.806.000	
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100 Persen	205.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Piyungan	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100 Persen	93.480.000	
12.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	10 Lembaga	30.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Piyungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	10 Lembaga	19.637.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Pembangunan di Desa		Perencanaan Pembangunan di Desa					Perencanaan Pembangunan di Desa			
12.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	175.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	73.842.500	
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	30.750.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	85.326.000	
13.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	2 Laporan	30.750.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	2 Laporan	85.326.000	
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Piyungan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	245.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	9.835.000	
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	245.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	9.835.000	
14.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	245.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	9.835.000	
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Piyungan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	45.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Piyungan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	139.406.500	
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Piyungan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	45.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Piyungan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	100 Persen	139.406.500	
15.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	50 orang	45.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	75 orang	139.406.500	

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Piyungan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan UMKM yang efektif dengan inovasi produk, pemanfaatan teknologi dan penguatan merk atau branding.
2. Pelestarian dan mempromosikan seni budaya lokal melalui Gelar Budaya yang rutin dilaksanakan serta pengembangannya melalui media social

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target Tahun 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80
2		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	95.40	95.52

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan Kapanewon Piyungan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi</i>	-			100 Persen	35.996.000,00						-	40.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<i>Capaian Pelaksanaan Urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan</i>	-			100 Persen	35.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kap. Piyungan	-	40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi</i>				2 Dokumen	35.996.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kap. Piyungan		40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.847.837.717,00							4.333.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN						3.847.837.717,00							4.333.229.175,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</i>	-			81.13 Angka 95.53 Indeks	3.484.740.217,00						-	3.642.479.175,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	-			100 Persen	5.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	-	40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		20.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		20.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	2.924.009.433,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	-	2.546.088.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2.874.749.433,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		2.478.088.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	44.160.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		65.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.100.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah	-			100 Persen	2.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	-	3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	7.603.700,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		43.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	9.938.100,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		6.800.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	82.168.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		249.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.153.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		1.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 persen	192.784.744,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	-	305.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	62.590.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		80.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	11.745.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		50.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	40.756.950,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		108.591.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan</i>	-			100 Persen	35.050.000,00						-	165.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon</i>	-			100 Persen	24.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	-	115.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4 Laporan	14.175.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan		50.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				4 Dokumen	10.625.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan		65.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Cakupan Koordinasi Pelayanan Kapanewon</i>	-			100 Persen	10.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	-	50.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				2 Laporan	10.250.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan		50.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat</i>	-			100 Persen	178.806.000,00						-	235.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Cakupan koordinasi pemberdayan Masyarakat kalurahan</i>	-			100 Persen	93.480.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	-	205.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				10 Lembaga Kemasyarak atan	19.637.500,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan		30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	73.842.500,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan		175.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kecamatan	-			100 Persen	85.326.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat kapanewon Piyungan	-	30.750.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	85.326.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat kapanewon Piyungan		30.750.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 persen	9.835.000,00						-	245.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	-			100 Persen	9.835.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	-	245.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	9.835.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan		245.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-			100 persen	139.406.500,00						-	45.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	-			100 persen	139.406.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	-	45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	139.406.500,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan		45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	J U M L A H							3.983.833.717,00						4.523.229.175,00		

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU PIYUNGAN,



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM

NIP 196910311991021001